

Sekalipun tidak ada faktor internal maupun eksternal yang begitu deterministik dalam mempengaruhi perubahan yang ada di pedesaan, namun banyak ahli yang sepakat bahwa program-program pembangunan pemerintah bagi pembangunan pedesaan termasuk di dalamnya introduksi teknologi pertanian baru yang diperkenalkan pemerintah dan perluasan peran negara serta penetrasi kapitalisme di pedesaan yang manifestasinya seragam menududuki posisi sentral. Buku ini, mencoba mengungkap dampak penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani dulu, kini dan masa depan.

Transformasi Masyarakat Desa



ANGGOTA IKAPI
No: 202/JTV/2018



Editor:
Pardamean Daulay
Heru Purwandari

TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA

Dulu, Kini Dan Masa Depan



Transformasi Masyarakat Desa

dulu, kini, dan masa depan

Editor:

Pardamean Daulay; Heru Purwandari



Transformasi Masyarakat Desa: Dulu, Kini, & Masa Depan.

Penulis:

ISBN:

978-623-267-702-9

Editor :

Pardamean Daulay; Heru Purwandari

Layouter:

Tim Kun Fayakun

Penyunting:

Tim Kun Fayakun

Desain sampul dan tata letak:

Tim Kun Fayakun

Penerbit:

Kun Fayakun

ANGGOTA IKAPI

No: 202/JTI/2018

Redaksi:

Kun Fayakun

Genjong Kidul Sidowarek

Ngoro Jombang

Jawa Timur

61473

Hp. 0856 0755 8802

Email: penulis.kunfayakun@gmail.com

Web: kunfayakunbooks.blogspot.com

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: Transformasi Masyarakat Desa *dulu, kini dan masa depan*.

Muatan buku ini adalah himpunan makalah akhir hasil “olah pikir” mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan (SPD) ketika menempuh mata kuliah Sejarah Politik Pedesaan. Sebagaimana layaknya buah karya ilmiah, tema-tema yang didialogkan merupakan pilihan topik berdasarkan minat masing-masing penulis sehingga diharapkan menjadi lebih bernas karena terlahir dari “keresahan intelektual”, mewujudkan dalam bentuk kajian, gugatan, gagasan, tawaran dan juga solusi terhadap persoalan masyarakat pedesaan dewasa ini.

Proses penulisan buku ini sudah lama direncanakan dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu hingga terbitnya buku ini. Terkhusus kepada Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA (Guru Besar IPB) yang bukan karena bantuan beliau buku ini tidak akan pernah ada. Hasil diskusi dengan beliau memperdalam dan mendorong kami untuk menjelajah semesta dimensi-dimensi sejarah pedesaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika terlihat ada kekayaan dan warna dalam buku ini, itu karena jasa beliau dalam membimbing dan memandu kami meniti jalan panjang dalam keilmuan “Sejarah Politik Pedesaan”.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada para penulis (Agustina, Rokhani, Sofyan, Rita, Taya, Jean, Jeter, dan Purnomo) yang telah mengizinkan tulisannya dimuat dalam buku ini. *Semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya.*

Hadir dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, dengan kerendahan hati kami berharap, karya ini akan menjadi “setitik embun” yang mampu menyegarkan wacana sejarah politik pedesaan khususnya kehidupan petani di Indonesia.

Pardamean Daulay
Heru Purwandari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	Vi
PENDAHULUAN.....	viii
BAB I. LINGKUP AGRARIA DAN INTRODUKSI KEKUASAAN.....	1
1. Pola Hubungan Sosio-Agraria: Petani, Negara, dan Kapitalisme Perkebunan.....	2
2. Pengaruh Kekuasaan Pada Akses Sumberdaya Agraria Petani: Introduksi Kekuasaan Negara dalam Kasus Perampasan Tanah Petani.....	16
BAB II. PERLAWANAN PETANI.....	30
1. Petani dan Perlawanan Terhadap Kekuasaan: Kasus Petani Sei Lapan di Sumatera Utara.....	31
2. Pergolakan Petani Pasca Peristiwa 25 Juli 1979: Kasus Jenggawah di Jawa Timur.....	48
3. Perlawanan Orang Moronene Atas Deterministik Penguasa.....	70
4. Gerakan Masyarakat Adat dan Komuniti Forestri: Pemberi Warna Suatu Bentuk Desa Baru.....	88
BAB III. IMPLIKASI GLOBALISASI TERHADAP PETANI.....	112
1. Dampak Globalisasi Terhadap Petani Jepang.....	113
2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani Cengkeh...	132
BAB IV. KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN.....	133

1. Pergeseran Peran Pemimpin dan Perubahan Struktur Masyarakat di Pedesaan.....	134
2. Pergeseran Kepemimpinan DEsa di Perkebunan Kalibakar...	160

Transformasi Masyarakat Desa

dulu, kini dan masa depan



Editor

**Pardamean Daulay
Heru Purwandari**

Pendahuluan

Pardamean Daulay dan Heru Purwandari

Di Indonesia pekerjaan yang “amat mulia” tetapi mengenaskan adalah petani. Dikatakan amat mulia, sebab dari tetes-tetes keringat merekalah dapat dihasilkan bulir-bulir beras komoditas paling strategis dan begitu penting. Dari kerja keras para petanilah yang membuat sebagian besar penghuni bumi ini dapat merasakan nikmatnya makan nasi. Namun, dibalik segala kemuliaan itu, sebagian besar petani di Indonesia menderita pemiskinan yang tak berkesudahan. Dari hari ke hari, kubang penderitaan bukan makin terentaskan, tetapi lewat jargon pembangunan dan modernisasi pertanian, mereka justru makin terjerembab dan termarginalisasi.

Gejala marginalisasi petani semakin nyata akibat ketidakmampuan mereka menyesuaikan diri dengan arus transformasi. Apalagi bila dikaitkan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas, yang akan memperluas arus perdagangan internasional yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Kenyataan ini akan menjadi peluang bila Indonesia telah siap bersaing, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila tidak siap.

Sekalipun tidak ada faktor internal maupun eksternal yang begitu deterministik dalam mempengaruhi perubahan yang ada di pedesaan, namun banyak ahli yang sepakat bahwa program-program pembangunan pemerintah bagi pembangunan pedesaan termasuk di dalamnya introduksi teknologi pertanian baru yang diperkenalkan pemerintah dan perluasan peran negara serta penetrasi kapitalisme di pedesaan yang manifestasinya seragam menududuki posisi sentral.

Dalam kaitan ini, pertanyaan pokok yang kemudian perlu dijawab adalah bagaimana dampak transformasi dan penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani? Untuk menjawab pertanyaan ini, agaknya kita mesti melihat aspek sejarah petani dan desa di Indonesia. Mengapa aspek sejarah? Karena transformasi sosial merupakan suatu perjalanan waktu yang didalamnya tercakup suatu masa peralihannya. Disamping itu, fenomena sosial budaya dan politik masyarakat desa adalah salah satu dari kajian sosiologis yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah.

Buku ini, mencoba mengungkap bagaimana dampak penetrasi kapitalisme terhadap kehidupan desa, khususnya bagi kehidupan petani. Secara umum berbagai tulisan yang ada selalu melihat aspek sejarah lokal yang dapat menjelaskan perkembangannya dulu, kini dan masa depan. Kendatipun demikian, buku ini dibagi secara sistematis ke dalam tiga bagian. *Pertama*, lingkup Agraria; *kedua*, perlawanan petani terhadap kekuasaan; *ketiga*, implikasi globalisasi terhadap petani; serta *keempat* kepemimpinan lokal di pedesaan.

Bagian pertama dalam buku ini, mencoba mengungkapkan pola hubungan sosio-agraria (petani, negara, dan kapitalisme perkebunan) yang ditulis oleh **Heru Purwandari**. Penulis berusaha melihat permasalahan utama dalam hubungan antara kebijakan dibidang perkebunan dengan kondisi petani dalam perspektif sejarah, yaitu bagaimana sesungguhnya penetrasi perkebunan dan kebijakan yang mendasarinya berimplikasi pada pola hubungan antar subjek agraria pada masa sekarang. Dalam konteks agraria perkebunan, penetrasi kapitalisme yang diwakili oleh keberadaan perkebunan di Jawa sejak masa kolonial menimbulkan permasalahan terkait dengan posisi petani dalam pola hubungan yang terbentuk. Implikasi kebijakan pada masa kolonial diartikulasikan pada masa kemerdekaan dalam bentuk

ketimpangan akses sumber-sumber agraria dimana petani terkalahkan oleh kepentingan swasta dan negara.

Perjalanan politik dan kebijakan agraria masa kolonial menghasilkan sebuah iklim politik yang menjamin kebesaran modal *partikelir* asing sebagai modal raksasa dengan mengorbankan rakyat. Tradisi tersebut berlanjut pada masa kemerdekaan dimana arah kebijakan agraria yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemodal terutama setelah dikeluarkannya Inpres No.4/1985 tentang besarnya nilai investasi yang bisa ditanamkan melalui PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk menggalakkan ekspor nonmigas. Dalam sektor perkebunan ditunjukkan peran pemerintah yang cukup penting dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas masuknya modal asing. Pemerintah banyak memberikan kemudahan bagi pemilik modal untuk kembali mengusahakan berbagai komoditas perkebunan yang laku di pasaran internasional. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui konstelasi politik dan kekuasaan yang menjadi dasar pijakan dibangunnya kebijakan sektor perkebunan. Implikasi dari beberapa hal tersebut diatas sangat jelas mempengaruhi posisi petani dalam iklim perkebunan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketegasan tentang implikasi kebijakan suatu pemerintah terhadap petani coba dilihat oleh **Agustina MP**. Penulis mencoba memaparkan bahwa negara, petani dan desa sebenarnya terintegrasi ke dalam struktur yang lebih besar. Hadirnya kebijakan besar pemerintah yang mempengaruhi kehidupan petani termasuk pada akses sumber-sumber agraria. Merujuk pada teori ekonomi ganda, petani dan pemerintah memiliki gaya sosial yang berbeda. Petani dengan gaya subsisten dan pemerintah dengan gaya kapitalis. Perbedaan gaya sosial ini berpengaruh pada hubungan antara petani dan pemerintah. Tanah bagi pemerintah adalah komoditas, barang

produksi yang harus digunakan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa secara umum, sementara bagi petani tanah merupakan sumber kehidupan, sumber mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak terlalu luas dan gaya subsisten petani menyebabkan produksi pertanian tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mendukung usaha-usaha pertanian berskala besar yang dapat menyumbang devisa negara, walaupun dalam prakteknya dilakukan dengan merampas tanah petani. Gaya ekonomi pemerintah ini menjelaskan mengapa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha daripada petani. Introduksi kekuasaan pemerintah dalam perampasan tanah petani merupakan bukti nyata marginalisasi petani oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan kekuatan ABRI, dan kelemahan desa sebagai struktur pemerintahan terendah sebagai legalisasi pengalihan tanah dari gaya subsisten petani terhadap kapitalis.

Sementara itu, bagian kedua dari buku ini bercerita tentang perlawanan petani terhadap kekuasaan. Berkaitan dengan bagian ini, **Pardamean Daulay** menjelaskan catatan panjang sejarah yang menggambarkan betapa suramnya kondisi petani di Indonesia. Sejarah perjalanan petani di Indonesia lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik sosial keagrarian daripada praktek kehidupan yang berlandaskan demokrasi. Petani selalu saja dalam posisi yang selalu terpinggirkan dan perannya sekedar menjadi pelengkap dari sebuah komunitas masyarakat. Sebagai petani subsistensi yang miskin, seringkali ditindas atau diintimidasi untuk melepaskan hak atas tanahnya, kerap juga dipaksa untuk menanam komoditas tertentu sesuai kehendak penguasa. Penyerobotan tanah petani yang tidak diiringi dengan pemberian ganti rugi yang memadai, tidak adanya perlindungan hak-hak dalam pemilikan tanah, dan masih banyak gambaran buruk lainnya mengenai realitas petani

di Indonesia. Ironisnya, gambaran seperti itu tidak hanya terjadi pada masa kolonial, tetapi di era reformasi saat ini realitas petani masih tetap memilukan dan semakin termarginalkan.

Penyerobotan tanah, pengambilalihan tanah atas kepentingan negara, dan berubahnya struktur agraria menurut **Pardamean** menjadi awal pertentangan dan perlawanan petani, sebagaimana yang dicontohkannya di Sei Lapan Sumatera Utara. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan petani berupa non-kekerasan, yakni perlawanan dengan melalui proses kelembagaan dan melalui proses unjuk rasa. Fenomena menarik dari aksi perlawanan petani Sei Lapan adalah menguatnya isu politik lokal di Sumatera Utara dengan adanya keinginan sekelompok petani untuk mendirikan provinsi Sumatera Timur. Menguatnya isu lokal ini pada kenyataannya sebagai salah satu upaya petani untuk mendapatkan kembali tanah mereka yang telah dikuasai pemerintah dan pengusaha perkebunan. Untuk merubah kondisi dan keberadaan petani, **Pardamean** mengajukan agar dilakukan konsolidasi gerakan petani melalui penguatan organisasi petani sebagai alat perjuangan, baik perjuangan politik maupun ekonomi.

Berkaitan dengan penguatan organisasi petani, **Rokhani** dalam tulisannya menjelaskan sekalipun telah ada organisasi petani, namun keberadaannya baru sebagai perpanjangan tangan penguasa. Organisasi petani masih dinilai gagal dalam mewadahi aspirasi petani untuk mengaktualisasikan kepentingannya. Kelemahan dari sisi kelembagan ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada petani. Kasus Jenggawah adalah salah satu fakta perlawanan petani untuk menghadapi dominasi penguasa yang menghimpitnya. Dinamika perlawanan petani dilakukan dari protes diam-diam (*silent protest*) sampai pada cara yang radikal dan destruktif dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juli 1979, yang disertai dengan pembakaran. Sekalipun masih bersifat lokal, namun pada akhirnya kemenangan berada di pihak

petani. Pada akhirnya petani mau bersikap *kooperatif* terhadap perkebunan yang semula menjadi musuh bebuyutannya.

Sekalipun kondisi Jenggawah terlihat tertib, namun menurut **Rokhani** masih dikategorikan tertib sosial semu. Sewaktu-waktu dapat terjadi pergolakan bila penguasa menghimpit kehidupannya, dan mereka merasa bahwa batas subsistensinya terganggu. Di bawah kondisi tertib sosial yang semu ini, petani Jenggawah sibuk menata diri dengan pertanian organik sebagai agenda di masa kini maupun masa depan.

Hal yang sama coba dikemukakan oleh **Sofyan Sjaf** dalam tulisannya yang berjudul “Perlawanan Orang Moronene Atas Deterministik Penguasa”. Sikap deterministik dan kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya, seringkali menyebabkan masyarakat adat teralienasi akibat kebijakan sepihak yang diberlakukan oleh pemerintah. Inilah yang dirasakan oleh Orang Moronene yang dalam kehidupan sehari-harinya bertumpu pada pertanian yang tradisional. Dalam mengelola lahan pertaniannya, Orang Moronene menggunakan tanah adat yang bersifat komunal yang diwariskan secara turun temurun dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya.

Namun, semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 756/Kpts-II/1990 tentang penetapan Taman Nasional Rawa Opa Watumohai (TN RAW), maka Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melarang segala bentuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh Orang Moronene. Pelarangan untuk mengakses tanah adat merupakan sikap yang tidak menghargai kearifan lokal berakibat terjadinya konflik vertikal yang berkepanjangan. Pada posisi ini seringkali masyarakat adat mendapat perlakuan yang deterministik dari sang penguasa (baca: pemerintah).

Jika kita merefleksikan pengalaman pelaksanaan pembangunan di era Orde Baru, sudah banyak studi menunjukkan, bahwa kelemahannya bukan semata-mata karena terjadinya kekeliruan atau penyimpangan di tingkat implementasi, atau ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan akibat pembangunan, melainkan karena paradigma pemikiran yang mendasari model pembangunannya, yakni *developmentalisme*. Gagasan yang berakar dari paham kapitalisme itu secara empiris telah gagal memenuhi janjinya, karena terbukti telah menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu kegagalan itu mewujud dalam bentuk kerusakan sumberdaya alam dan peminggiran peran dan akses masyarakat adat terhadap sumberdaya disekelilingnya. Demikian **Rita Mustika Sari** menjelaskan tulisannya.

Selanjutnya, **Rita** menjelaskan bahwa Gerakan Masyarakat Adat (GMA) Indonesia lahir dari sebuah kondisi dimana komunitas yang selama ini hidup berdasarkan asal-usul, memiliki wilayah adat, kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, hukum dan lembaga adat hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Konsep Komuniti Forestri dielaborasi dalam bentuk Hutan Desa yang banyak dikembangkan di kawasan berhutan di Jawa. Hutan desa merupakan salah satu pilihan atau sumber kemandirian pendanaan otonomi desa jangka panjang. Di Luar Jawa GMA menjadi pendorong terbentuknya desa-desa bentukan baru yang mampu secara mandiri berdagang langsung dengan luar negeri.

Implikasi globalisasi terhadap petani coba dipaparkan pada bagian ketiga dari buku ini. **Taya Toru**, dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Globalisasi Terhadap Petani Jepang”, menjelaskan bahwa sejak Restorasi Meiji, pemerintah Jepang cenderung memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan melindungi sektor industri sehingga sektor pertanian termarginalisasi karena jumlah petani semakin menurun walaupun telah melaksanakan *landreform* untuk distribusi

tanah pertanian secara merata. **Taya** melihat secara historis petani di Jepang selalu dipengaruhi globalisasi. *Kurofune* (kapal perang Amerika Serikat) menyebabkan Restorasi Meiji terjadi. GHQ (*General Headquarters*) melakukan *landreform* untuk menentang negara komunis. WTO (*World Trade Organization*) menghapuskan undang-undang yang berfungsi melindungi petani Jepang.

Dalam konteks globalisasi, **Taya** menyatakan pemerintah Jepang tidak memperhatikan sektor pertanian, bahkan cenderung mengeksploitasi petani dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah menciptakan petani tersingkir sehingga mereka sulit hidup dalam sektor pertanian, akhirnya mereka meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor industri. Hal ini menyebabkan, daya produksi Jepang semakin menurun sehingga pertumbuhan swasembada makanan Jepang hanya 40% saja serta sisanya diimpor dari luar negeri. Secara teoritis globalisasi pada umumnya dimengerti sebagai suatu fenomena ekonomi, yang salah satu definisi formalnya adalah ekspansi kegiatan ekonomi yang melintasi batas-batas politik nasional dan regional, dalam bentuk peningkatan gerakan barang-barang dan jasa, termasuk modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi melalui perdagangan barang dan jasa.

Globalisasi ternyata bukan saja menyebabkan perubahan struktur sosial petani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan **Taya**, namun juga mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah terhadap petani. **Jean F. J. Timban** dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani Cengkeh di Minahasa” menyatakan bahwa kondisi harga cengkeh seperti saat ini nyaris tidak masuk akal, sebab semestinya saat kurs dollar AS naik, harga cengkeh juga ikut naik. Setelah ditelusuri, perkembangan tidak masuk akal ini memang menjadi *tren* di Indonesia yang perekonomiannya didominasi oleh beragam bentuk keputusan presiden (Keppres) dan aturan

tataniaga. Kebijakan intervensi pemerintah ternyata tetap menyengsarakan rakyat, khususnya petani cengkeh. Petani cengkeh merasa terjajah dengan sistem tataniaga sejak era Keppres Nomor 50 Tahun 1978, Keppres No.8/1980 dan selanjutnya berbagai Keppres di era BPPC hingga terbitnya Keputusan Pemerintah yang membebaskan cengkeh dari semua bentuk tataniaga sekaligus memberikan harapan baru karena harga cengkeh bisa mencapai puncaknya pada medio 2001 sekitar Rp. 85.000,- per kilogram. Namun, petani akhirnya dikejutkan kembali dengan fakta harga yang bergerak turun dan berlangsung sangat cepat. Dan sampai saat ini harga cengkeh tetap berada pada harga yang belum menguntungkan petani karena harga yang berlaku antara Rp. 30.000,- hingga Rp. 35.000,-. Harga ini menurut perhitungan petani, cukup untuk menutupi biaya produksi, karena naiknya biaya tenaga kerja.

Pada bagian terakhir dalam buku ini berbicara tentang kepemimpinan di pedesaan yang mengambil kasus Indonesia Luar dan Indonesia Dalam (meminjam istilah Geertz). Untuk kasus Indonesia Luar, **Jeter Donald Siwalette** menjelaskan sebelum adanya peraturan yang mengatur Pemerintahan Desa masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, dalam sistem pemerintahan seperti kelompok, rumah-rumah misalnya; Jawa Barat (*kampung*), Aceh (*Gampong*), Tapanuli (*Huta atau Kuta*), Sumatera Selatan (*Marga*), Maluku (*Negorij*), Makasar (*Gaukay*), dan sebagainya. Hal demikian membuktikan masyarakat masing-masing daerah maupun desa mempunyai ciri-ciri kehidupan yang sangat berbeda sesuai dengan adat istiadat tersendiri yang dimilikinya

Di Maluku suatu ciri menyolok di masyarakat pedesaan adalah adanya organisasi adat mengenai beberapa jabatan-jabatan dalam administrasi desa meliputi; Kepala Desa (*Raja*) suatu jabatan yang turun temurun, walaupun secara resmi dipilih oleh rakyat, kepala adat yang dianggap menguasai suatu bagian desa (*Aman*) dan Kepala Bagian Desa (*Kepala Soa*),

Selain itu masih ada pejabat-pejabat lain seperti: (*Tuan Tanah*): yang oleh adat dianggap menguasai hukum adat tanah dan soal-soal warisan tanah. (*Kapitan*): seorang pejabat adat yang dulu merupakan panglima perang, (*Kewang*) Polisi hutan dan laut, dan (*Marinyo*): Penyiar Informasi di Desa, Semua pejabat-pejabat pemerintahan Desa tersebut tergabung dalam suatu dewan Desa, bernama *badan saniri Negeri* atau *saniri Raja* dengan pola kekerabatan yang sangat kuat.

Peran negara membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak mempertimbangkan lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat dan sudah terpolo di desa semenjak dahulu, dampaknya adalah terjadi perubahan kepemimpinan dengan adanya peran negara tersebut telah menimbulkan berbagai dinamika di kalangan masyarakat desa dan ikut mempengaruhi struktur masyarakat dan organisasi pemerintahan desa.

Sebagai penutup, tulisan **Purnomo** mengetengahkan kepemimpinan pada desa perkebunan dulu, kini dan masa depan. Purnomo menegaskan bahwa dinamika kepemimpinan di desa perkebunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya desa, kondisi politik yang melingkupi desa, serta kondisi ekonominya. Masing-masing kondisi memerlukan corak kepemimpinan tertentu agar kepentingan masyarakat terpenuhi juga kepentingan perusahaan perkebunan. Kedua kepentingan tersebut pasang surut sesuai dengan perkembangan desa dan perkebunan. Pada saat perkebunan memiliki kekuatan yang besar mengikat secara ekonomi pada sebagian besar penduduk desa, maka kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perkebunan. Kepemimpinan desa tidak ditentukan oleh penduduk dan hanya bagian dari administrasi pabrik.

Berkembangnya wacana demokratisasi di desa dan semakin terbukanya peluang ekonomi diluar perkebunan,

menurut **Purnomo** mempengaruhi terhadap corak kepemimpinan desa ke depan akan memperhatikan mutu yang lebih baik. Tidak hanya pemimpin kuat sebagai akibat kepentingan politik perusahaan, atau kepentingan perang dan partai, namun akan lebih paripurna yakni *tiyang pinter, tiyang ngertos, tiyang saget, tiyang kuat dan besar hati*. Hal itu memungkinkan karena saat ini pemimpin dapat langsung dipilih secara bebas oleh rakyat dan terdapat juga perwakilan Desa yang dapat menjaga mutu itu lebih baik.

Akhirnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi mereka yang memiliki keinginan untuk bekerja bersama membangun masyarakat pedesaan.



BAB I

Lingkup Agraria dan Introduksi Kekuasaan

PETANI DAN PERLAWANAN TERHADAP KEKUASAAN :

Kasus Petani Sei Lapan di Sumatera Utara

Oleh:
Pardamean Daulay

Pendahuluan

Secara historis, realitas kehidupan petani di Indonesia selalu berubah mengikuti konteks ekonomi, politik, dan budaya masyarakat di luar petani. Kecenderungan yang menonjol dari kehidupan petani lebih sering dari sisi negatif yaitu kondisi mereka yang sangat buruk. Ironisnya, struktur politik kekuasaan dan struktur sosial yang ada senantiasa merugikan, menindas dan mendudukkan petani dalam posisi marjinal. Lemahnya posisi petani menyebabkan mereka tidak dapat mengakses sumber daya agraria dan seringkali terlibat dalam kapitalisme global. Terlebih lagi bagi petani berlahan sempit, keberadaan kapitalisme global makin memperburuk kondisi ekonomi petani.

Bertitik tolak pada situasi demikian, maka petani semakin tertekan dan berdampak pada munculnya perlawanan. Wolf (1983) menegaskan bahwa petani telah melakukan pemberontakan sebagai wujud ekspresi kekecewaan mereka terhadap struktur kekuasaan dan struktur sosial yang berkembang pada saat itu,¹ walaupun pada akhirnya Roxborough (1986) membantahnya, dengan menyatakan bahwa

¹ Sejarah selalu menunjukkan bahwa gerakan protes petani umumnya menjadi landasan bagi gerakan-gerakan demokratisasi di perkotaan. Kasus revolusi Inggris dan revolusi Jerman pada tahun 1948 yang sebagian besar dipimpin oleh gerakan revolusioner perkotaan pada akhirnya mengalami kegagalan karena lemahnya gerakan petani terhadap kekuasaan kaum aristokrasi-feodal yang menguasai tanah (Bahari, 1999).

tidak ada alasan yang kuat untuk kaum tani sebagai suatu kelas yang berhasil memerangi kendali kekuasaan negara, kekuasaan negara selalu dijalankan oleh kelompok kota.

Fenomena yang menarik dalam konteks gerakan petani adalah bahwa petani subsisten yang oleh Scott (1993) memiliki etika dahulukan selamat, dan Roxborough (1986) menyatakan petani tidak mungkin melakukan perlawanan terhadap penguasa. Akan tetapi, realita yang berkembang saat ini menunjukkan petani mampu melakukan protes dan perlawanan. Gerakan protes petani ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memarjinalkan mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Nanang S. (1999), negara, tentara dan pemodal ditempatkan sebagai musuh petani, karena institusi-institusi inilah yang menyengsarakan kehidupan petani.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah makin meningkatnya perjuangan petani pasca kejatuhan rezim Orde Baru.² Semangat petani untuk mengambil kembali lahan yang menjadi haknya, tumbuh di mana-mana. Hal ini terjadi di berbagai tempat, seperti di Jawa Barat, Kalimantan, Lampung, Sulawesi, dan Sumatera Utara terutama di daerah basis perkebunan dan perhutani. Lendong (2002), menyatakan ada tiga faktor penting yang menyebabkan semakin menguatnya gerakan perlawanan petani. *Pertama*, runtuhnya kekuasaan Orde Baru, yang mengakibatkan kendali kekuasaan yang mengekang hak dan kebebasan petani kehilangan legitimasinya. *Kedua*, tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan petani bahwa mereka telah menjadi korban ketidakadilan Orde Baru, dimana lahan garapannya dirampas secara paksa oleh negara pada waktu itu untuk kemudian diserahkan kepada pemilik

² Berdasarkan data-data yang dipublikasikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria dan aksi-aksi protes petani sepanjang kurun waktu pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Gus Dur, jumlahnya mencapai 1.744 kasus. Angka ini belum termasuk kasus-kasus yang luput dari pantauan media massa, Komnas HAM, dan LSM (Bahari, 2001).

modal. *Ketiga*, akumulasi krisis ekonomi, membuat rakyat yang sebelumnya bekerja di sektor informal di perkotaan, terpaksa harus kembali ke sektor pertanian.

Perlawanan petani sehari-hari adalah perjuangan panjang dengan dinamika naik-turun sejalan dengan menguatnya pertentangan antara kenyataan hidup petani, himpitan struktural/vertikal dan kekerasan pembangunan di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Bila kita merujuk pada hasil studi tentang gerakan petani Scott (1993), Popkin (1986), Kartodirdjo (1984), Kuntowijaya (1994), umumnya mencari jawaban yang sama atas pertanyaan mengapa petani yang dianggap sebagai masyarakat tradisional dan berada jauh dari wilayah pusat-pusat kekuasaan melakukan pemberontakan atau gerakan-gerakan masif dan tidak terputus sepanjang lintasan sejarah? Apa yang melatar belakangi mereka melakukan gerakan dan bagaimana cara mereka melakukan aksi-aksinya dari mulai yang kecil-kecil dan sporadis hingga sampai pada pemberontakan skala nasional?

Tulisan ini tidak turut menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut untuk mengambil kesimpulan umum tentang faktor-faktor utama pemicu gerakan petani dari seluruh periode sejarah. Setiap gerakan petani memiliki corak dan sumber-sumber pemicu tersendiri di masing-masing wilayah (Kartodirdjo, 1992), sehingga tidak mungkin untuk melakukan rekonstruksi tipe-tipe gerakan petani menjadi satu wajah. Hal ini juga banyak dikritik penganut ilmu-ilmu sosial hermeneutik³ yang lebih menekankan independensi lokal dan perbandingan di antara faktor-faktor di dalam berbagai gerakan petani. Tulisan ini hanya membatasi pada gerakan petani yang terjadi di Sei Lapan Sumatera Utara dengan tetap mengaitkan faktor-faktor sejarah lokal yang menjadi pengaruh munculnya

³ Metode hermeneutik adalah sistem atau aturan tentang penjelasan, pemahaman, dan penyingkapan makna dari pemikiran, perilaku, gejala sosial, atau teks-teks tertulis (Poespoprodjo W, 1987).

gerakan petani. Tulisan ini juga mencoba menemukan bentuk-bentuk perlawanan dan rangkaian perjuangan panjang petani di Sei Lapan dan bagaimana dampaknya terhadap struktur sosial dan politik di aras lokal Sumatera Utara.

Perlawanan Petani Dalam Perspektif Moral dan Politik

Sepanjang perjalanan sejarah, sejak masa prakapitalisme sampai kapitalisme modren, kapitalisme sebagai perwujudan dua sisi mata uang "ekonomi dan politik". Petani selalu digambarkan berada dalam ketergantungan sosial maupun ekonomi dengan lapisan lainnya, terutama dengan lapisan pengusaha. Ketergantungan ini menyebabkan posisi petani lemah terhadap tekanan dan tuntutan dari penguasa. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa petani tidak pernah melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Ketika hubungan patron-klien tererosi oleh kapitalisme, sehingga pertukarannya menjurus pada praktek eksploitasi dalam bentuk pemungutan pajak atau kerja paksa, Scott (1989) menunjukkan bahwa petani di Asia Tenggara, seperti di Burma dan Vietnam, bangkit melakukan perlawanan.

Dalam pandangan Roxborough (1986) konteks perlawanan petani seperti itu masih berkisar pada persoalan subsistensi, belum berskala politik. Hanya jika terjadi pergeseran struktural yang menyebabkan disintegrasi, aliansi kelas dominan, barulah petani mendompleng kondisi ini untuk terlibat dalam politik massal atau pemberontakan berkedok politik. Artinya, Roxborough tetap melihat bahwa petani meskipun melakukan perlawanan, tetap dalam bentuk perlawanan yang tersubordinasi, bukan berlandaskan semata-mata inisiatif dan kekuatan petani. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pernyataan Roxborough tersebut patut dipertanyakan. Menurut Bahari *dalam* Suhendar (2002) gerakan petani sejak abad dua puluh sudah mengambil bentuk-bentuk

modren dan sekuler, tanpa dikaitkan dengan agama dan budaya. Petani pedesaan saat ini justru membentuk aliansi-aliansi politik untuk memperjuangkan nasibnya, baik dalam bentuk partisipasi mereka di partai politik maupun dalam gerakan-gerakan non-partisan yang mengambil bentuk ekstra parlementer.

Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Scott dan Popkin di pedesaan Asia, mengenai gerakan petani di masa kolonial, menunjukkan tiga faktor utama yang menimbulkan kemarahan kaum petani pedesaan, yaitu perubahan struktur agraria, meningkatnya eksploitasi, dan merosotnya status sosial atau deprivasi relatif. Baik kajian ekonomi moral Scott (1989) maupun ekonomi rasional Popkin (1986) menunjukkan hal yang sama dalam melihat tekanan eksternal yang mendorong perlawanan petani. Tekanan itu dapat berasal dari supra desa, dalam desa, juga karena kondisi alam. Hal yang berbeda hanya pada aspek bagaimana petani bereaksi atas tekanan itu. Oleh karena itu, pergolakan-pergolakan petani di Indonesia juga dapat dilihat dalam konteks itu.

Scott *dalam* Bahari (2002) secara mendalam menelusuri faktor-faktor eksogen dan endogen yang menciptakan pergolakan agraria selama periode kolonialisasi. Penetrasi kapitalisme melalui komersialisasi pertanian, pasar dan pembentukan negara baru di pedesaan Asia menjadi pemicu utama munculnya gerakan petani. Kapitalisme kolonial membawa dan menanamkan mode produksi baru (*mode of production*) yang kemudian mengubah sistem dan kelembagaan tradisional pedesaan.⁷

⁷ Penduduk desa di Asia pada masa prakapitalis umumnya merupakan sebuah unit rumah tangga yang bertumpu pada pertanian tradisional, produksinya sebagian besar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan komunitasnya. Mereka hidup dalam suatu desa yang memiliki nilai-nilai dan tanggung jawab kolektif dalam pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan pembayaran pajak kepada para penguasa.

Masuknya sistem kapitalisme kolonial ke pedesaan telah menimbulkan ancaman dan keresahan bagi petani-petani gurem. Sistem tersebut menghancurkan dan mengubah tatanan sosial-ekonomi serta budaya masyarakat desa. Desa-desa yang awalnya bersifat tertutup dan otonom diintegrasikan kedalam sistem kapitalis global (pasar dunia) sehingga menjadi terbuka. Sehingga, desa yang tadinya menjadi alat pelindung dan penjamin keamanan subsistensi bagi warganya, pada akhirnya berubah fungsinya menjadi pelayan negara kolonial.

Perubahan-perubahan yang sangat drastis tersebut telah menimbulkan rasa frustrasi di kalangan petani, terlebih lagi ketika mereka mengalami gagal panen karena bencana alam berkepanjangan atau krisis ekonomi. Ditambah dengan beban eksploitasi dalam bentuk pemungutan pajak atau kerja paksa yang dilakukan birokrasi kolonial. Kondisi inilah yang membuka jalan bagi para petani untuk melakukan gerakan perlawanan menentang sistem yang ada dan menimbulkan kembalinya sistem sosial lama (Scott *dalam* Bahari, 2002).

Pendekatan ekonomi moral yang dipakai Scott tersebut, dalam perkembangannya mendapat kritikan dari para teoritis ekonomi politik baru dalam memahami gerakan petani, yang salah satunya dipelopori oleh Samuel L. Popkin. Pendekatan ekonomi politik ini berusaha untuk memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya dalam kerangka analisis, yang didasarkan pada aktor individual, yang selalu berusaha untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Asumsinya, manusia pada dasarnya egois, rasional dan selalu berupaya untuk memaksimalkan *utilitas* dan keuntungan untuk dirinya sendiri (Popkin, 1986). Popkin tidak setuju dengan pendapat kaum ekonomi moral yang memandang protes-protes politik dan keagamaan para petani sebagai reaksi-reaksi dari krisis subsistensi ataupun “kerawanan-kerawanan struktural” untuk menggambarkan di mana protes-protes itu akan terjadi. Sebaliknya ia berpendapat bahwa merosot atau jatuhnya jangka

pendek itu tidak perlu atau tidak cukup besar untuk timbulnya protes-protes, yang bahkan tanpa adanya kejatuhan dalam kesejahteraan petani berusaha mencari cara-cara kolektif atau individual untuk memperbaiki situasi mereka.

Menurut Popkin (1986), latar belakang petani melakukan gerakan perlawanan terhadap sistem kekuasaan kapitalis kolonial bukan karena adanya keinginan untuk merestorasi kembali tatanan masyarakat tradisional, melainkan karena adanya keinginan untuk mengubah nasib agar lebih baik dan menolak bentuk-bentuk eksploitasi yang menambah beban ekonomi mereka. Sebagian besar pemberontakan-pemberontakan petani yang terjadi di pedesaan Asia selama masa kolonial bertujuan menentang kebijakan pemerintah kolonial dalam pemungutan pakak, kerja paksa, dan sistem sewa atau kontrak tanah.

Perlawanan Petani Sei Lapan

Gerakan perlawanan petani di desa Sei Lapan merupakan salah satu dari sekian kasus yang menyita perhatian nasional. Pada lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan *resettlement* ini terjadi berbagai permasalahan, baik antar sesama masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Suatu keadaan yang hampir sama dengan masalah pertanahan lain di Indoensia. Kasus Sei Lapan telah menjadi masalah sosial yang telah merugikan petani, oleh karena itulah para petani mencoba melakukan penyelesaiannya dengan suatu gerakan perlawanan.

Tanah garapan diperoleh dengan membeli pada Kepala Lorong. Bupati Langkat melalui Perda No. 5 tahun 1975 tentang izin membuka lahan yang dinyatakan terbuka untuk masyarakat umum. Kemudian karena tidak berjalan efektif Perda tersebut dicabut pada tahun 1978 dengan SK. No. 34/1/1978, yang selanjutnya wilayah ini dijadikan sebagai transmigrasi lokal. Secara operasional, tanah petani yang terkena proyek sekitar 10.000 Ha dianjurkan untuk

mendaftarkan diri. Namun, anjuran tersebut tidak pernah diindahkan oleh penduduk. Diterbitkannya Surat Keputusan Presiden No. 0001/Datrans/1982, tentang penetapan lahan yang telah digunakan masyarakat Sei Lapan, sebagai lokasi Transmigrasi Lokal yang diperuntukkan kepada sebanyak 500 KK. Oleh pemerintah pusat kemudian proyek ini diberikan bantuan dalam hal pendanaan. Sinergik dengan itu pemerintah pusat melalui Sesdalopbang kemudian menyerahkan pengelolaannya secara penuh kepada Pemda Kabupaten Langkat. Kemudian ke dalam lahan yang masuk perusahaan (PT. Tara Bintang Nusa) yang telah membeli tanah dari Kepala Lingkungan IV seluas 34 ha dijadikan Perkebunan Pola Inti Rakyat (PIR) (Sitorus, 1994).

Tidak setuju atas tindakan tersebut, maka petani berdelegasi ke Kanwil Departemen Transmigrasi Sumut, agar mencabut peraturan tersebut dan menata ulang kembali tanah petani yang diserobot oleh perkebunan swasta. Namun sebelum terealisirnya kesepakatan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh, terjadi penangkapan oleh Kepolisian terhadap warga yang mengambil hasil sawit dengan alasan bahwa tindakan tersebut adalah pencurian. Mengetahui warganya ditahan di kepolisian masyarakat mendatangi kepolisian dengan maksud memberi kebebasan bagi warganya. Upaya tersebut tidak berhasil, akhirnya masyarakat secara kolektif mendatangi Markas Polsek Pangkalan Brandan. Warga bertahan untuk meminta dikembalikannya rekan mereka. Tuntutan tidak berhasil akhirnya warga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan Mapolsek Pangkalan Brandan rusak total.

Secara sosiologis, gerakan petani Sei Lapan merupakan pengungkapan rasa ketidakpuasan akan kondisi yang dialami oleh masyarakat petani, sehingga muncullah gerakan perlawanan menentang penguasa yang telah merugikan dan menyengsarakan mereka. Gerakan perlawanan petani muncul akibat mereka merasa tidak memiliki kemampuan politik dalam

melakukan tekanan terhadap penguasa (*decision maker*). Ketidakpuasan dalam hal pengurusan tanah diungkapkan juga dengan cara demonstrasi (mengadu ke DPR), baik disalurkan lewat LBH, dan HKTI, tetapi apa yang menjadi tuntutan petani belum ada membuahkan hasil.

Menurut Sitorus (1994), dalam kenyataannya gerakan perlawanan petani Sei Lapan dapat dikategorikan atas dua aksi yaitu *violence* dan *non violence*. Aksi *non violence* berhasil menciptakan opini publik yang mendukung perjuangan petani, sementara aksi *violence* mengakibatkan petani menjadi posisi bersalah. Aksi massa petani termasuk aksi kekerasan dilakukan oleh penduduk karena adanya ketergantungan terhadap tanah. Tanah memang merupakan penyangga pendukung kehidupan petani. Hidup matinya petani tergantung pada tanah. Oleh karena itu jika ada pihak-pihak luar yang mengintervensi kepentingan petani atas tanah, maka petani akan berusaha mempertahankan tanah yang dikuasainya. Sebaliknya petani yang menanamkan investasi bertujuan untuk memanfaatkan tanah untuk melipatgandakan modal yang dimilikinya. Hal inilah yang memunculkan terjadinya konflik kepentingan atas tanah. Jika ditelusuri lebih jauh aksi massa masyarakat Sei Lapan disebabkan adanya nilai ketidakpuasan pada tiap-tiap individu yang termasuk di dalamnya. Ketidakpuasan ini terakumulasi antara lain terhadap penanganan masalah pertanahan yang tertunda-tunda, terganggunya kepentingan-kepentingan individu, tidak terintegrasinya kebijakan instansi yang terkait dengan masalah pertanahan.

Perlawanan sehari-hari, bukan sekedar jargon dan ideologi kesejahteraan bagi petani. Perlawanan semacam itu adalah kemenangan bagi petani, karena hasilnya lebih pasti, baik secara psikologis maupun materi, ketimbang bentuk-bentuk perlawanan frontal (aksi *violence*) yang justru akan membuat posisi mereka semakin sulit. Tentu saja tidak semua perlawanan petani akan menghasilkan kemenangan, tetapi

secara psikologis akan memberikan kepuasan batin, harga diri dan meringankan beban masyarakat. Sehingga, tidak sejalan dengan perlawanan sehari-hari yang biasa dikedepankan bahwa mereka serba tunduk, patuh, sekedar menerima subordinasi dan mencari jaminan dari tuan patronnya. Para petani di sini didorong untuk menjadi lebih agresif dalam usaha. Secara mengejutkan, berbagai kesepakatan dilakukan untuk menjalankan siasat perlawanan-perlawanan, sehingga seringkali berhasil dalam pencapaian tujuan. Tetapi proses dinamis perlawanan petani Sei Lapan dari sembunyi-sembunyi, frontal, kompromis dan seterusnya, merupakan dinamika dalam siasat perlawanan menuju kemenangan petani Sei Lapan.

Politik Lokal Pasca Perlawanan Petani Sei Lapan

Perlawanan petani Sei Lapan seperti yang dikemukakan di atas sebenarnya merupakan akibat dari perkembangan pertanian sejak beberapa dekade sebelumnya. Perubahan struktur agraria yang ditandai dengan adanya proses komersialisasi pertanian dan masuknya sistem ekonomi pasar telah mengakibatkan tersingkirnya kaum petani dari lahan pertanian mereka. Banyak di antara mereka yang terjerat hutang dan terpaksa harus menyerahkan tanah mereka kepada pengusaha swasta dan menjadi buruh tani pada perkebunan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan munculnya polarisasi sosial yang sangat tajam. Sementara petani yang tidak bertanah, baik karena penipuan maupun petani yang telah menjual tanahnya semakin terpuruk. Di pihak lain terjadi akumulasi keuntungan pada pemilik tanah. Sejak revolusi hijau terbuka akses yang mudah bagi para pengusaha perkebunan untuk memperoleh kredit dan suplai pertanian. Seiring dengan terbukanya hubungan dengan dunia luar, pihak perkebunan menjadi perantara (*broker*) yang menghubungkan desa dengan wilayah supradesa. Sistem pertanian di Sei Lapan menjadi

semakin terkomersialisasi dengan membawa segala dampaknya pada petani tanpa tanah yang tidak memiliki posisi tawar.

Dengan demikian, sejauh menyangkut mobilisasi petani, maka masalah hubungan di antara dua kelompok ini menjadi isu yang utama. Apakah ciri kehidupan komunitas desa yang berupa hubungan resiprositas, solidaritas, dan kerja sama harmonis masih ada? Ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan pertumbuhan wirausaha tani ternyata telah menimbulkan lebih banyak persaingan, eksploitasi, dan ketergantungan. Akibatnya, kesenjangan di dalam tukar-menukar meningkat dengan posisi klien yang tidak menguntungkan. Dalam hal inilah, maka upaya menggerakkan bangkitnya organisasi petani untuk terus melakukan perlawanan sangat diperlukan.

Pasca perlawanan petani di Sei Lapan menunjukkan bahwa kondisi politik lokal semakin marak. Hal ini juga didukung oleh era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto, sehingga saat ini fenomena kasus perlawanan petani yang menuntut pengembalian tanah semakin meningkat di Sumatera Utara.¹¹ Beberapa kasus pertanahan yang sudah lama diperjuangkan petani, kini berkembang lagi. Misalnya, perjuangan masyarakat penunggu yang menuntut pengembalian tanah jaluran yang merupakan hak milik rakyat melayu yang tergabung dalam BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia), sesuai dengan Undang-undang kresidenan pada masa Kolonial Belanda. Pada satu sisi, maraknya perlawanan petani di Sumatera Utara sudah sampai kepada perpecahan di tubuh organisasi petani. Hal ini disebabkan adanya keinginan dari berbagai golongan untuk mendirikan Provinsi Sumatera Timur, sebagai asal mulanya

¹¹ Harian Express terbitan lokal di Medan, menunjukkan selama tahun 2000 jumlah kasus tanah di Sumatera Utara semakin meningkat yakni mencapai 213 kasus, dimana Kabupaten Langkat mendominasi sebanyak 83 kasus, dalam hal ini termasuk kasus perlawanan petani Sei Lapan.

Sumatera Utara. Namun, di pihak lain ada beberapa organisasi petani yang menolak pendirian provinsi baru tersebut.¹²

Munculnya gagasan pembentukan provinsi Sumatera Timur, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kembali hak-hak masyarakat asli atas tanah adat. Hal ini diambil untuk membendung dominasi kekuasaan pemerintah dan pengusaha perkebunan baik PTPN maupun perkebunan Swasta yang melakukan perlawanan terhadap petani dengan kekuatan Tentara. Hingga, kini persoalan pro dan kontra atas pendirian provinsi Sumatera Timur masih menjadi agenda politik lokal di Sumatera Utara.

Penutup: Konsolidasi Gerakan Petani Menuju Keadilan Agraria

Petani dan tanah merupakan satu kesatuan. Sulit membayangkan bagaimana kondisi kehidupan petani jika mereka tidak mempunyai akses dalam penguasaan lahan garapan. Sayangnya, kenyataan itulah yang terjadi. Meskipun UUPA 1960 menempatkan tanah sebagai jiwa dan nafas hidup rakyat, ketentuan tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh kebijakan pembangunan Orde Baru. Hal ini antara lain ditandai oleh keluarnya Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Pertambangan NO. 7 tahun 1967.¹³ Kedua UU tersebut telah menggeser hak dan kepentingan rakyat kecil. Sebaliknya, secara nyata memperlihatkan prioritas untuk mengejar keuntungan bagi pemodal. Akibatnya, konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pemodal menjadi kenyataan yang memilukan. Dengan kata lain, filosofi tanah

¹² Lebih lanjut penjelasan keinginan segelintir petani untuk mendirikan Provinsi Sumatera Timur dapat dibaca dalam tulisan Budi Agustono (2002) mengenai Orang Melayu Versus Pendatang : Sengketa Tanah di Sumatera Utara.

¹³ Lebih lanjut tentang penjabaran kedua Undang-Undang ini dalam Hafid (2001), Perlawanan Petani, Kasus Tanah Jenggawah.

sebagai jiwa dan nafas hidup rakyat direduksi menjadi komoditas yang bisa dikomersialisasikan demi memaksimalkan keuntungan.

Merunut pada pemikiran Scott, perjuangan petani sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Perlawanan tersebut ditujukan untuk menentang ketidakadilan yang menimpa mereka sebagai akibat perilaku dan tindakan yang dilakukan segolongan manusia, baik yang berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun dari kekuatan-kekuatan di luar masyarakat, termasuk dalam hal ini pemerintah beserta aparatnya yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Di mana saja sumber ketidakadilan bercokol, disitulah perlawanan petani bersemi. Hanya saja, model perlawanan tersebut cenderung kurang terorganisir, misalnya dengan berperilaku pura-pura patuh, memperlambat proses pekerjaan, mencuri, sampai membakar aset-aset perusahaan yang telah menjadi simbol ketidakadilan.

Untuk merubah kondisi dan keberadaan petani, tidak ada jalan lain kecuali dengan membangkitkan kesadaran petani untuk berpolitik, dengan keberanian petani dalam memperjuangkan nasibnya secara otomatis kekuatan politik masyarakat mulai diperhitungkan. Dalam hal inilah maka organisasi petani sangat diperlukan sebagai alat perjuangan, baik sebagai perjuangan politik maupun sebagai perjuangan ekonomi. Dengan adanya organisasi sebagai tempat petani memecahkan permasalahan yang ada di tengah kehidupan petani, lambat laun akan menjadi tempat belajar bagi petani sekaligus alat perjuangannya. Apabila seluruh petani di Indonesia mempunyai organisasi secara kuat, berkat hasil bentukan petani sendiri dan bukan lahir atas kehendak dari luar petani, maka petani akan dapat memperjuangkan nasibnya secara bebas dan sekaligus dapat berpengaruh dalam percaturan politik di Indonesia. Secara kuantitas jumlah petani merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain, apabila hal ini tidak disadari petani maka kondisi

petani tidak akan berubah, walaupun berubah pasti dalam jangka waktu yang panjang, sementara permasalahan petani dari hari ke hari semakin kompleks.

Kenyataan yang tidak bisa dilupakan adalah peranan aliansi dan jaringan memiliki andil yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perlawanan petani . Belajar dari sejarah perlawanan petani Sei Lapan memperlihatkan kepada kita bahwa pihak-pihak di luar pemerintah, pengusaha dan pemerintah, terdapat juga pihak yang lain yang mengupayakan penyelesaian masalah. Pihak yang turut mengupayakan penyelesaian masalah terdiri dari berbagai latar belakang, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Solidaritas Sei Lapan yang lahir atas inisiatif masyarakat setempat. Selain itu terdapat juga kelompok akademisi yaitu mahasiswa. Untuk tingkat Sumatera Utara terdapat berbagai dukungan yang dilakukan oleh Forum Solidaritas mahasiswa Sumut untuk membantu mencari solusi yang bijak. Demikian juga dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ditingkat nasional. Upaya tiga kelompok inilah yang cukup vokal dalam menciptakan opini publik sehingga masalah Sei Lapan sampai sekarang tercatat sebagai kasus gerakan petani yang terbesar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agustono, Budi et.al, 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II*, Wahana Informasi Masyarakat dan Akatiga, Bandung.
- Bahari, S. 2002. Petani Dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi *dalam* Suhendar, E (ed). 2002. *Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Akatiga, Bandung.
- _____. 2001. *Gerakan dan Keterlibatan Petani Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6 No. 2 Juli 2001.
- Juliantara, Dadang, ed. 2000. *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat : Emansipasi Dan Demokrasi Mulai dari Desa*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 1994. *Radikalisasi Petani*, Bentang Offset, Yogyakarta.
- Kahin, A., 1989, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti, Jakarta
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- _____, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta.
- Leibo, Jefra, 1990. *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Lendong, Roman, N. 2002. *Konsolidasi Gerakan Petani Bagi Percepatan Reforma Agraria*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7, No. 3 Desember 2002.
- Nanang Hari S. 1999. *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Tani di Indonesia : Studi Kasus Gerakan*

- Petani Era 1980-an*. Jurnal Agraria No. 35 TAHUN X Edisi Juli – Agustus 1999.
- Marzali, A. 1993. *Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indoensia dalam Jurnal Antropologi* NO. 54. FISIP UI.
- Poespoprodjo, W. 1987. *Interpretasi, Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya*, Remadja Karya, Bandung.
- Popkhin, Samuel, L, 1986, *Petani Rasional*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Pratikto, Fadjar, 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan*, Media Pressindo, Jakarta.
- Roxborough, I 1986, *Teori -Teori Keterbelakangan*, LP3S, Jakarta.
- Suhendar, Endang & Yohana, 1997. *Konflik Agraria dan Posisi Petani*, Akatiga, Bandung.
- Scott, James, C. 1989. *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.
- _____ 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suharso, Pujo, 2002. *Tanah, Petani Politik Pedesaan*, Pondok Edukasi, Yogyakarta.
- Setiawan, Bonnie, 2003. *Globalisasi Pertanian : Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, Institute for Global Justice, Jakarta.
- Sutrisno, Loekman, 1998. *Pertanian pada Abad ke 21*, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sitorus, Henri, 1994. *Masalah Sei Lapan Sudah Usai ?* dalam Jurnal Realitas No. 1 Tahun 1994. Jurusan Sosiologi FISIP USU, Medan.
- _____, 1997. *Sengketa Tanah Translok Sei Lapan*, dalam Suhendar, Endang & Winarni, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung.

- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjondronegoro, Sediono, M.P. 1984. Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana di Daerah Pedesaan Jawa, dalam Koentjaraningrat et.al, *Masalah-Masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan*, LP3ES, Jakarta.
- White, B., 1996, *Optimisme Makro, Pesimisme Mikro ? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia 1967-1987*, Dalam 70 Tahun Sayogjo, Grasindo, Jakarta.
- Wolf, Eric R. 1995. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali Jakarta.